

HAKIKAT IDEOLOGI PANCASILA DALAM PERJALANAN BANGSA INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM DEMOKRASI

Achmad Iswandi Ishaq¹, Suryaningsi Suryaningsi²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

²Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Februari 2026

Available Februari 2026

iswandiishaq1702@gmail.com

suryaningsi@fkip.unmul.ac.id

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa sendiri yang diyakini kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Tujuan untuk menyelidiki sejarah dan perkembangan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia; Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Lama; Perkembangan ideologi Pancasila pada masa Orde Baru; Perkembangan ideologi Pancasila pada Era Reformasi. Metode Penelitian normative atau studi kepustakaan (Library research), penulis mencari data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diketengahkan untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Pembahasannya adalah pada awalnya, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik.

Pada masa Orde Lama, pada masa Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Pada masa Orde Baru, pada masa Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Era Reformasi yang diharapkan sebagai era pembaruan memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara

Kata Kunci: Pancasila; Ideologi; Nilai-nilai Luhur

ABSTRA

Pancasila, as the nation's philosophy of life, is actually the embodiment of the nation's own cultural values, believed to be true. Pancasila was derived from the nation's culture that has existed, grown, and developed for centuries. The purpose of this study is to investigate the history and development of Pancasila as the ideology of the Indonesian nation; the development of Pancasila ideology during the Old Order; the development of Pancasila ideology during the New Order; and the development of Pancasila ideology during the Reformation Era. Using a normative research method or library research, the author sought primary data related to the issues to be addressed to serve as a theoretical foundation for the research. The discussion focuses on the initial understanding of the concept of Pancasila as a common platform for various political ideologies developing in Indonesia at that time. The integrative value of Pancasila implies that Pancasila served as a means of unifying society and a procedure for resolving conflicts. During the Old Order, under President Sukarno, Pancasila underwent ideologization. During the New Order era, under President Suharto, the Indonesian people

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com

reverted to Pancasila and the 1945 Constitution as the foundation of the state. The Reformation Era, envisioned as a time of renewal, brought a breath of fresh air to the Indonesian nation. It was hoped that the Indonesian people would once again practice the noble values of Pancasila as a guide for their nation and state.

Keywords: Pancasila; Ideology; Noble Values

1. PENDAHULUAN

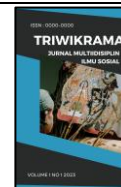
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan perwujudan nilai-nilai budaya yang sudah ada sejak lama dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Nilai-nilai ini tumbuh dan berkembang berabad-abad lamanya dalam kehidupan sosial, adat istiadat, dan agama di seluruh Nusantara. Pancasila bukan sekadar produk konseptual dari para pendiri bangsa, melainkan hasil asimilasi nilai-nilai lokal dan universal yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia (Suryaningsi, 2017). Dengan demikian, Pancasila mencerminkan jiwa, karakter, dan kepribadian bangsa, yang dapat menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, sosial, dan ekonomi (Soekarno, 1968; Mahfud, 2018).

Sebagai ideologi dasar, Pancasila memiliki peran strategis dalam membentuk norma dan etika kehidupan bermasyarakat, serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pancasila terdiri dari lima prinsip utama, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menegaskan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar moral dan spiritual masyarakat; Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia; Persatuan Indonesia, yang menjadi fondasi persatuan dan kesatuan bangsa; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang menekankan prinsip demokrasi deliberatif; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menegaskan keberpihakan pada ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama (Asshiddiqie, 2010; Mubyarto, 2004).

Sejak ditetapkan pada 1 Juni 1945, Pancasila menjadi dasar negara yang sah secara konstitusional, dan terus menjadi acuan normatif dalam berbagai kebijakan publik. Namun, penerapan Pancasila tidak bersifat statis. Seiring perubahan zaman, nilai-nilai Pancasila mengalami penyesuaian dan reinterpretasi agar tetap relevan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Setiap era sejarah Indonesia menimbulkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila secara konkret. Misalnya, pada masa Orde Lama, Pancasila lebih banyak dijadikan sebagai pedoman ideologis nasionalisme dan persatuan bangsa, sedangkan pada masa Orde Baru, Pancasila sering digunakan sebagai instrumen politik yang lebih bersifat normatif dan terkadang dipaksakan untuk tujuan stabilitas negara (Anderson, 2009).

Era Reformasi membuka kesempatan bagi implementasi Pancasila secara lebih demokratis dan partisipatif. Nilai-nilai seperti kerakyatan, demokrasi, dan keadilan sosial mulai lebih terlihat dalam kebijakan pembangunan ekonomi, perlindungan hak-hak rakyat, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat penyimpangan dan ketimpangan (Muhammd Arrifky, 2021)(Yulia Erika, 2021). Misalnya, pembangunan ekonomi sering menguntungkan kelompok tertentu, sementara prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi tidak hanya memerlukan penerapan normatif, tetapi juga pengawasan, penegakan hukum, dan evaluasi regulatif agar tetap sesuai dengan tujuan konstitusionalnya (Mahfud, 2018; Asshiddiqie, 2010).

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai dan landasan filosofis dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan UMKM. Prinsip keadilan sosial (Sila Kelima) menuntut negara dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan makro, tetapi juga menyejahterakan masyarakat secara merata (Afriliani, 2021). Hal ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dan mengutamakan keberpihakan pada rakyat kecil (Tambunan, 2020; Mubyarto, 2004).



Lebih lanjut, nilai Pancasila yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan agama memberikan dimensi moral dan etis bagi pembangunan hukum dan ekonomi (Ihsani, 2021). Nilai-nilai ini berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong transparansi, keadilan, dan partisipasi Masyarakat (Suryaningsi et al., 2016). Dalam implementasinya di Kabupaten Kutai Barat, Pancasila menjadi acuan untuk mengembangkan UMKM, koperasi rakyat, dan sektor ekonomi lokal agar tetap berkelanjutan, adil, dan merata, meskipun pandemi COVID-19 memberikan tekanan ekonomi yang signifikan. Pandemi ini menegaskan bahwa nilai Pancasila bukan sekadar simbol, melainkan pedoman praktis untuk mengatasi krisis sosial dan ekonomi serta memastikan keberpihakan pada rakyat kecil (OECD, 2020; Tambunan, 2020).

Sejarah panjang Pancasila juga menunjukkan bahwa sebagai ideologi, Pancasila bersifat dinamis dan adaptif (Shavira Ramadhanita, 2022). Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, tantangan ekonomi, dan perubahan politik (Januastasya, 2021). Oleh karena itu, memahami Pancasila sebagai ideologi dan sumber nilai dalam pembangunan ekonomi daerah tidak hanya menuntut kajian hukum dan regulasi, tetapi juga analisis sosiokultural yang mendalam (Suryaningsi, 2019). Kabupaten Kutai Barat, sebagai daerah yang kaya sumber daya alam namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kualitas SDM, membutuhkan penerapan nilai Pancasila yang komprehensif dan konkret untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat (Mahfud, 2018; Soekarno, 1968).

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga merupakan pedoman normatif dan praktis bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial, terutama dalam menghadapi tantangan masa kini seperti pandemi COVID-19. Penerapan nilai Pancasila di Kabupaten Kutai Barat harus terus dievaluasi agar kebijakan pembangunan ekonomi benar-benar mencerminkan asas kekeluargaan, keberpihakan pada rakyat, dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi dan sumber nilai tetap relevan sebagai landasan pembangunan daerah yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan.

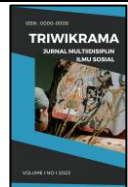
2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau yang dikenal juga sebagai studi kepustakaan (library research). Dalam pendekatan ini, penulis menelusuri data primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk dijadikan landasan teoritis serta kerangka analisis. Penelitian hukum normatif merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, berdasarkan metode dan pemikiran tertentu, dengan tujuan mempelajari gejala hukum tertentu melalui analisis dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai kesesuaian norma hukum dan kebijakan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Kutai Barat.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, yang bertujuan menelusuri perkembangan konsep dan implementasi ekonomi kerakyatan serta nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi daerah dari masa ke masa. Pendekatan ini penting untuk memahami landasan filosofis dan normatif kebijakan ekonomi lokal serta bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Dengan memadukan pendekatan normatif dan historis, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang holistik mengenai peran

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



Pancasila sebagai ideologi dan sumber nilai dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus menilai kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Sumber data penelitian ini bersifat sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah daerah, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta literatur terkait ekonomi kerakyatan dan prinsip Pancasila. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah dokumen dan literatur secara sistematis untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan. Analisis data dilakukan secara **kualitatif**, dengan menekankan interpretasi norma hukum, evaluasi kebijakan, dan identifikasi kesesuaian antara nilai Pancasila dengan praktik pembangunan ekonomi di Kabupaten Kutai Barat, khususnya dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia

Pengertian Pancasila sebagai „ideologi negara“ adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

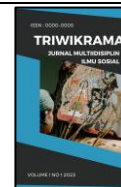
Keputusan bangsa Indonesia mengenai Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Dari ketetapan MPR tersebut dapat diketahui bahwa di Indonesia kedudukan Pancasila adalah sebagai ideologi negara, selain kedudukannya sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai cita-cita bernegara dan sarana yang mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret dan operasional aplikatif, sehingga tidak hanya dijadikan slogan belaka. Dalam Ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara.

Pada awalnya, konsep Pancasila dapat dipahami sebagai common platform atau platform bersama bagi berbagai ideologi politik yang berkembang saat itu di Indonesia. Pancasila merupakan tawaran yang dapat menjembatani perbedaan ideologis di kalangan anggota BPUPKI. Pancasila dimaksudkan oleh Soekarno pada waktu itu yaitu sebagai asas bersama agar dengan asas itu seluruh kelompok yang terdapat di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut.

Menurut Adnan Buyung Nasution, telah terjadi perubahan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai platform demokratis bagi semua golongan di Indonesia. Perkembangan doktrinal Pancasila telah mengubahnya dari fungsi awal Pancasila sebagai platform bersama bagi ideologi politik dan aliran pemikiran sesuai dengan rumusan pertama yang disampaikan oleh Soekarno menjadi ideologi yang komprehensif integral. Ideologi Pancasila menjadi ideologi yang khas, berbeda dengan ideologi lain.

Pernyataan Soekarno ini menjadi jauh berkembang dan berbeda dengan pernyataan yang disampaikan oleh Notonagoro. Beliau melalui interpretasi filosofis memberi status ilmiah dan



resmi tentang ideologi bagi masyarakat Indonesia, yang pada mulanya Pancasila sebagai ideologi terbuka sebuah konsensus politik menjadi ideologi yang benar-benar komprehensif. Interpretasi ini berkembang luas, masif, dan bahkan monolitik pada masa pemerintahan Orde Baru.

Pancasila dilihat dari sudut pandang politik merupakan sebuah konsensus politik, yaitu suatu persetujuan politik yang disepakati bersama oleh berbagai golongan masyarakat di Negara Indonesia. Dengan diterimanya Pancasila oleh berbagai golongan dan aliran pemikiran, maka mereka bersedia bersatu dalam negara kebangsaan Indonesia. Dalam istilah politiknya, Pancasila merupakan common platform masyarakat Indonesia yang plural. Sudut pandang politik ini teramat penting untuk bangsa Indonesia sekarang ini. Jadi, sebenarnya perkembangan Pancasila sebagai doktrin dan pandangan dunia yang khas tidak menguntungkan kalau dinilai dari tujuan mempersatukan bangsa.

Banyak para pihak yang sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesepakatan bersama, common platform, dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia (Sucipto, 2021). Kesepakatan bersama bahwa pancasila sebagai ideologi negara inilah yang harus kita pertahankan dan ditumbuhkembangkan dalam kehidupan bangsa yang plural ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka makna Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Negara Indonesia yaitu:

1. Nilai-nilai dalam Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia.
2. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karenanya menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia.

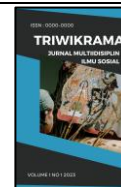
Perwujudan Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti menjadi cita-cita penyelenggaraan bernegara terwujud melalui Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2001 mengenai Visi Indonesia Masa Depan. Dalam Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri atas tiga visi, yaitu:

1. Visi ideal, yaitu cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pada alinea kedua dan alinea keempat.
2. Visi antara, yaitu visi bangsa Indonesia yang berlaku sampai dengan tahun 2020.
3. Visi lima tahunan, yaitu sebagaimana dimaksudkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Hamdan Mansoer, mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, demokratis, bersatu, adil dan sejahtera pada dasarnya merupakan upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama. Bangsa yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani Indonesia. Sebagai suatu cita-cita, nilai-nilai Pancasila diambil dimensi idealismenya (Ur, 2021). Sebagai nilai-nilai ideal, penyelenggaraan negara hendaknya berupaya bagaimana menjadikan kehidupan bernegara Indonesia ini semakin dekat dengan nilai-nilai ideal tersebut.

Nilai integratif Pancasila mengandung makna bahwa Pancasila dijadikan sebagai sarana pemersatu dalam masyarakat dan prosedur penyelesaian konflik. Masyarakat Indonesia telah menerima Pancasila sebagai sarana pemersatu, yang artinya sebagai suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya disetujui sebagai milik bersama. Pancasila dijadikan semacam social ethic dalam masyarakat yang heterogen.

Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk pasal-pasal pada setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat (Refinaldi, 2021). Hal ini dikarenakan The Founding Father menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan sosial masyarakat kita melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, apabila nilai-nilai luhur yang



terkandung di dalam Pancasila dijadikan rujukan dalam setiap peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak akan mendapatkan pertentangan dari masyarakat.

Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama

Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan, tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia.

Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada di dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda.

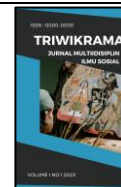
Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan daerah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajah dapat diusir, bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam. Dalam kehidupan politik, sila keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sistem ini menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan.

Padahal dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensial, namun dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujud. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dengan munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, ada juga DI/TII yang ingin mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam.

Pada periode tahun 1950 sampai dengan 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal, yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahannya yang liberal lebih menekankan hak-hak individual. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, PRRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI.

Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilihan umum yang paling demokratis. Akan tetapi, anggota Konstituante hasil pemilihan umum tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan.

Pada periode tahun 1956 sampai dengan 1965, dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat yang merupakan amanah nilai-nilai Pancasila, kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno melalui „Dekrit Presiden“. Oleh karena itu, terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi presiden yang otoriter, mengangkat dirinya menjadi presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Selain itu, terjadinya politik



konfrontasi karena digabungkannya nasionalis, agama, dan komunis, yang ternyata tidak cocok dengan konsep Negara Indonesia. Terbukti bahwa pada masa ini adanya kemerosotan moral di masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Dalam mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Untuk mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang Undang Dasar 1945, sosialisme al Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya adalah terjadinya rencana kudeta oleh PKI dan lengsernya Presiden Soekarno dari jabatannya.

Dinamika perdebatan ideologi antara kelompok Islam dengan Pancasila adalah wajah dominan perpolitikan nasional pada masa Orde Lama. Pada dasarnya, hal ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan kelompok Islam atas penghapusan Piagam Jakarta dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi ketika penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan dan mengekang kelompok Islam.

Hal ini tampak jelas ketika akhir tahun 1950-an, Pancasila sudah bukan merupakan titik pertemuan bagi semua ideologi sebagaimana yang dimaksud oleh Soekarno dahulu. Pancasila telah dimanfaatkan sebagai senjata ideologis untuk mendelegitimasi tuntutan Islam bagi pengakuan negara atas Islam. Bahkan, secara terang-terangan pada tahun 1953 Presiden Soekarno mengungkapkan kekhawatirannya tentang implikasi-implikasi negatif terhadap kesatuan nasional jika kelompok Islam di Indonesia masih memaksakan tuntutan mereka untuk sebuah negara Islam.

Pada masa ini juga, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat dalam pemberontakan regional berideologi Islam. Kepentingan-kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an, sampai akhirnya melahirkan Gerakan 30 S/PKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama.

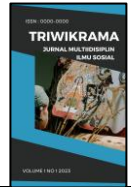
Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Baru

Meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak-tarik di antara tiga kekuatan politik -Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI- dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965, menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenal sebagai G 30 S/PKI. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam.

Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G 30 S/PKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penantangan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963 (ketika UU Darurat dicabut oleh Soekarno) tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik.

Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk:

1. Pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin



- keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan/presiden/panglima tertinggi/pemimpin besar revolusi/mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi.
2. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan angkatan lain dengan sebaik baiknya.
 3. Ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat perintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasi demonstrasi. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Supersemar, kendati secara resmi masih menjabat Presiden dalam status „Presiden Konstitusional“.

Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung Soekarno, DPR GR dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai Presiden. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan TAP No. XXXIII/MPRS/1967, yang sekaligus mendudukkan Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Setahun kemudian, melalui TAP No. XLIII/MPRS/1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden definitif.

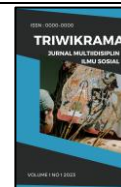
Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi dipimpin menamakan diri sebagai „Orde Baru“. Yang muncul sebagai pemeran utama Orde Baru adalah Angkatan Darat. Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Untuk mendapatkan dominasi di DPR, pemerintah mengusulkan adanya pengangkatan sebagian anggota DPR oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah menghendaki pemilu sistem distrik. Partaipartai yang ikut membahas rancangan undang-undang itu di DPR menolak usul pemerintah, baik yang menyangkut pengangkatan anggota DPR maupun yang menyangkut sistem pemilihan.

Satu model yang dianggap dapat menjelaskan realitas politik Orde Baru adalah rezim otoriter birokratis, yang melenceng jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efisien, dan tidak memungkinkan adanya proses bergaining yang lama. Munculnya rezim ini disebabkan adanya semacam delayed-dependent development syndrome di kalangan elite politik, seperti ketergantungan pada sistem internasional dan kericuhan-kericuhan politik dalam negeri. Rezim ini didukung oleh kelompok-kelompok yang paling dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal.

Tekad Orde Baru menjamin stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada era Orde Lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila. Penegasan bahwa stabilitas politik menjadi prasyarat pembangunan ekonomi secara tidak langsung dapat berimplikasi pada pengurangan pluralisme kehidupan politik atau pembatasan pada sistem politik yang demokratis.

Pada awal kehadirannya, Orde Baru memulai langkah pemerintahannya dengan langgam libertarian. Orde Baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi dipimpin ke sistem demokrasi liberal. Akan tetapi, kenyataannya langgam libertarian tidak berlangsung lama, sebab di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter



yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru politik Indonesia. Segera setelah format baru terbentuk, sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter.

Setelah format baru politik Indonesia dikristalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR, langgam sistem politik mulai bergeser lagi ke arah yang otoritarian. Gagasan demokrasi liberal dicap sebagai gagasan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila dan karenanya harus ditolak. Hasil Pemilu 1971 yang memberikan 62,8% kursi DPR kepada Golkar semakin memberi jalan bagi tampilnya eksekutif yang kuat.

Rezim Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila, melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus berhasil memberantas paham komunis di Indonesia. Akan tetapi, implementasi dan aplikasinya sangat mengecewakan. Beberapa tahun kemudian, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintah sehingga tertutup bagi tafsiran lain. Pancasila justru dijadikan sebagai indoktrinasi. Presiden Soeharto menggunakan Pancasila sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaannya.

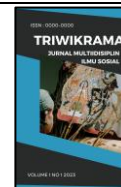
Ada beberapa metode yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila. Pertama, melalui ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah melalui pembekalan. Kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat untuk membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila, atau yang disebut sebagai asas tunggal. Ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas negara, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer sehingga tidak ada pihak-pihak yang berani untuk mengkritik pemerintah.

Dalam sistem pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila, yaitu dengan diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Selain itu, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya.

Presiden Soeharto juga melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak ada menjatuhkan pemerintah.

Penyelewengan lainnya yang sangat buruk dan menyimpang dari nilai-nilai luhur Pancasila adalah bahwa Presiden Soeharto melanggengkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga pada masa ini dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia.

Puncaknya adalah saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter di tahun 1997 yang menyebabkan perekonomian Indonesia anjlok sehingga memicu gerakan besar-besaran untuk menggulingkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.



Selama rezim Orde Baru berkuasa, terdapat beberapa tindakan penguasa yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu:

1. Melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun.
2. Terjadi penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4.
3. Adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut bersuara.
4. Adanya penindasan secara fisik, seperti pembunuhan di Timor Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus di Tanjung Priok, kasus pengrusakan pada 27 Juli, dan lain sebagainya.
5. Perlakuan diskriminasi oleh negara terhadap masyarakat non pribumi (keturunan) dan golongan minoritas.

Perkembangan Ideologi Pancasila pada Era Reformasi

Kata „reformasi“ secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan.

Untuk melakukan reformasi, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, antara lain yaitu:

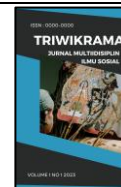
1. Adanya suatu penyimpangan.
2. Berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu.
3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi.
4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik.
5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, se terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Reformasi memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu:

1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh rakyat.
3. Melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya.

Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara dimasa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu pertahankan dan mana yang harus diperbaiki.

Pada awal reformasi, konfigurasi politik di DPR dan MPR tidak berubah, sama dengan konfigurasi politik yang dihasilkan melalui pemilu 1997, yang tetap didominasi oleh Golkar dan ABRI. Tetapi, karena adanya reformasi disertai penggantian Presiden, maka merubah sifat lama anggota MPR dan DPR tersebut dan mengikuti tuntutan reformasi, antara lain keterbukaan, demokratisasi, peningkatan perlindungan HAM, pemberantasan KKN, reformasi sistem politik dan ketatanegaraan, termasuk amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945.



Pascapemilu 1999, peranan partai politik di Indonesia kembali menguat, karena tidak adanya satu partaipun yang menguasai suara mayoritas di parlemen yakni MPR dan DPR, dan juga karena iklim demokrasi sudah menyelimuti kehidupan politik di Indonesia sejak Era Reformasi bergulir di Indonesia. Tatanan politikpun berubah seiring dengan semakin berkurangnya peran dan dwifungsi ABRI dalam ketatanegaraan. Pengangkatan anggota ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri sudah kurang dari periode sebelumnya. Dari 75 kursi yang tersedia menjadi 38 kursi di parlemen. Di MPR tidak ada lagi pengangkatan tambahan selain yang berasal dari DPR, yaitu melalui utusan daerah. Jumlah anggota DPR pascapemilu 1999 sebanyak 500 orang, 462 orang duduk melalui pemilihan umum sedangkan 38 orang merupakan pengangkatan wakil ABRI. Sedangkan, anggota MPR berjumlah 700 orang, 500 orang dari anggota DPR, 125 orang utusan daerah, dan 75 orang utusan golongan.

Dari konfigurasi politik yang demokratis tetapi tidak ada satu partai yang menguasai mayoritas di parlemen (dalam DPR), seperti yang telah diuraikan di atas, maka akan sulit bagi suatu fraksi untuk menggolkan programnya tanpa berkoalisi dengan fraksi-fraksi lainnya sampai tercapai mayoritas di kedua lembaga negara tersebut. Demikian juga halnya dengan eksekutif adalah sulit bagi presiden untuk menggolkan rancangan undang undang yang diajukan ke DPR. Dan di sisi lain, demikian pula terjadi dalam setiap sidang tahunan MPR, presiden harus dapat pula menampung aspirasi aspirasi fraksi-fraksi di MPR agar ia tidak kesulitan dalam meloloskan program dan pertanggungjawabannya.

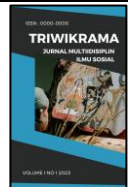
Sesudah tahun 2002, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR seperti pada masa sebelumnya. Presiden dapat diberhentikan MPR hanya bila melanggar hukum, bukan karena masalah politik.

Dengan konfigurasi politik seperti itu, peranan partai politik menguat kembali seperti pada masa liberal dulu. DPR dan pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang pemilu dan susunan DPR, DPRD, DPD dan pemilu langsung sebagaimana pada masa terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.

Pancasila yang pada dasarnya sebagai sumber nilai, dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara digunakan sebagai alat legitimasi politik. Semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila, kenyataannya tindakan dan kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila. Klimaks dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, sehingga muncullah gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, terutama di bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan.

Awal dari gerakan reformasi bangsa Indonesia yakni ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah kata „reformasi“, yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan reformasi, padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari reformasi itu sendiri. Contohnya, saat masyarakat hanya bisa menuntut dengan melakukan aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengrusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah. Oleh karena itu, dalam melakukan gerakan reformasi, masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri, agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut.

Pancasila merupakan dasar filsafat Negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa Orde Lama, pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan



Pancasila. Presiden diangkat seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa Orde Baru, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat politik oleh penguasa. Setiap warga negara yang tidak mendukung kebijakan penguasa dianggap bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, gerakan reformasi harus dimasukkan dalam kerangka Pancasila, sebagai landasan cita-cita dan ideologi bangsa agar tidak terjadi anarkisme yang menyebabkan hancurnya bangsa dan negara.

Eksistensi Pancasila masih banyak dimaknai sebagai konsepsi politik yang substansinya belum mampu diwujudkan secara riil. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna yang sesungguhnya.

Pada Era Reformasi, Pancasila sebagai re-interpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu.

Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payung ideologi Pancasila. Namun, faktanya masih banyak masalah sosioekonomi yang belum terjawab. Eksistensi dan peranan Pancasila dalam reformasi pun dipertanyakan.

Pancasila di Era Reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Lama dan Orde Baru, karena saat ini debat tentang masih relevan atau tidaknya Pancasila dijadikan ideologi masih kerap terjadi. Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu, dan bahkan ikut disalahkan menjadi sebab kehancuran.

Pancasila pada Era Reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap ada tantangan yang harus di hadapi. Tantangan itu adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Pada masa ini, korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Mereka justru merasa bangga, ditunjukkan saat pejabat itu keluar dari gedung KPK dengan melambaikan tangan serta tersenyum seperti artis yang baru terkenal.

Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata.

Reformasi dengan Paradigma Pancasila

Setiap sila pada Pancasila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi, antara lain yaitu:

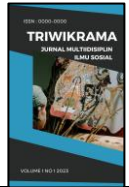
Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan padamoralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik bahwa manusia adalah makhluk Tuhan.

Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya bangsa dan negara Indonesia sebagai satu kesatuan.

Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia.

Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerak



reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selama Era Reformasi berjalan, terdapat beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila, antara lain yaitu:

1. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman.
2. Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan, sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi benturan kepentingan politik.
3. Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum.
4. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah.
5. Korupsi yang semakin terbuka dan membudaya

4. SIMPULAN DAN SARAN

Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Kenyataannya, Pancasila hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan diangkatnya presiden dengan masa jabatan seumur hidup. Pada masa Orde Baru, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, bangsa Indonesia kembali menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Kenyataannya, Pancasila lagi-lagi hanya dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan otoriter Presiden Soeharto yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun. Era Reformasi yang diharapkan sebagai era pembaruan memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, faktanya justru pada Era Reformasi ini bangsa Indonesia dirasakan semakin jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila. Rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi. Tindak pidana korupsi dilakukan secara terang terangan seolah-olah telah membudaya di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2011. Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kokom Komalasari. 2007. Pendidikan Pancasila. Jakarta: Lentera Cendikia.
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra. 2012. Pancasila Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Kencana.
- Moh. Mahfud M.D. 2012. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oetojo Oesman. 1993. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Surabaya: Karya Anda.

Oksep Adhayanto. 2015. "Implementasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Februari-Juli 2015.

- R. Warsito. 2012. *Pendidikan Pancasila Era Reformasi*. Banten: Ombak.
- Afriliani, R. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Anak pada Masa Pandemi di Kabupaten Kutai. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 115-126.
- Ihsani, M. H. (2021). Pemenuhan Hak anak di Masa Pandemi di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Nomos; Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 33-43.
- Januastasya, D. (2021). Kesenjangan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 226-232.
- Muhammd Arrifky. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Selah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 51-57.
- Refinaldi, A. (2021). Peran Pemerintah Meminimalisir Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 66-70.
- Shavira Ramadhanita, S. S. (2022). Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia dalam Menangani Kasus. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(2), 44-52.
- Sucipto, K. R. (2021). Analisis Kedudukan Hak Asasi Manusia Pekerja di Tempest Kerja. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 89-97.
- Suryaningsi. (2017). *Pendidikan Pancasila* (Academika (ed.)).
- Suryaningsi, S. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum* (Mulawarman). Mulawarman University Press.
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
- Ur, S. (2021). Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 127-134.
- Yulia Erika, S. S. (2021). Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan untuk Perwujudan Azasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 142-151.
- Salam. 1996. *Filsafat Pancasilaisme*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subandi Al Marsudi. 2003. *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahrial Syarbani. 2004. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia